

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Tentang Ideologi Gender

a. Pengertian Ideologi Gender

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi adalah kumpulan konsep bersistem yang dijadikan dasar pendapat (kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Secara etimologis, kata ideologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas kata *idea* dan *logia*. *Idea* berasal dari *idein* yang berarti melihat. *Idea* sesuatu yang ada di dalam pikiran sebagai hasil perumusan sesuatu pemikiran atau rencana. Sedangkan *logis* berasal dari kata *logos* yang berarti kata. Kata ini berasal dari *legein* yang berarti berbicara, *logia* berarti pengetahuan atau teori.¹ Secara terminologis ideologi adalah pemahaman yang terorganisir yakni nilai, orientasi dan kecenderungan yang saling melengkapi sehingga membentuk perspektif ide yang diungkapkan melalui komunikasi dengan media teknologi dan komunikasi antar pribadi.²

Proses pembentukan ideologi mengacu pada sistem keyakinan yang menjadi dasar tindakan individu atau masyarakat. Oleh karenanya ideologi mendasari tindakan untuk menghadapi realitas kehidupan dalam masyarakat.³ Ideologi memberikan nilai suatu tatanan tindakan masyarakat untuk bermakna dengan maksud menjustifikasi berbagai tindakannya. Namun jika tindakan tujuan seseorang atau kelompok dihubungkan dengan diklaimnya untuk menghasilkan ide-idenya, maka tindakan itu

¹ Riant Nugroho, *Gender Strategis Pengarus Utamaan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) , 16-17.

² Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.), 64.

³ Alex Sobur, *Analisis Teks Media*, 64.

lebih dimungkinkan menjadi berpihak untuk kepentingan diri sendiri.⁴

Selanjutnya berkaitan dengan istilah gender diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bentukan budaya yang dipelajari dan disosialisasikan sejak kecil. Perbedaan ini sangat penting, karena selama ini sering sekali mencampuradukan ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati (sex) dan yang bersifat bukan kodrati (gender).⁵

Perbedaan peran gender ini sangat membantu untuk memikirkan kembali tentang pembagian peran yang selama ini dianggap telah melekat pada manusia perempuan dan laki-laki untuk membangun gambaran relasi gender yang dinamis dan tepat serta cocok dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

Perbedaan konsep gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Secara umum adanya gender telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi dan bahkan ruang tempat dimana manusia beraktivitas. Sedemikian rupanya perbedaan gender ini melekat pada cara pandang kita, sehingga kita sering lupa seakan-akan hal itu merupakan sesuatu yang permanen dan abadi sebagaimana permanen dan abadinya ciri biologis yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki

Menurut Oakley gender adalah masalah budaya, ia merujuk pada klasifikasi sosial dari laki-laki dan perempuan menjadi 'maskulin' dan 'feminin'. Jadi ideologi gender adalah sistem pemikiran dan nilai-nilai yang mengatur peran seks, status sosial dan perilaku yang didahului oleh pembentukan identitas maskulin dan feminin.

⁴ Jainuddin Maliki, *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*, (Yogyakarta: UGM Press, 2001), 20.

⁵ Mufidah, *Paradigma Gender* (Malang: Bayumedia Publising, 2004), 4.

Kata gender dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status dan tanggung jawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan (konstruksi) sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian gender adalah hasil kesepakatan antar manusia yang tidak bersifat kodrati.⁶ Oleh karenanya gender bervariasi dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu waktu ke waktu berikutnya. Gender tidak bersifat kodrati dapat berubah dan dapat dipertukarkan pada manusia satu ke manusia lainnya tergantung waktu dan budaya setempat.

Ideologi gender merupakan rangkaian gagasan yang mendeskripsikan seksisme dari setiap masyarakat tertentu dan memberikan gambaran masyarakat di masa depan yang menciptakan kontradiksi antara laki-laki dan perempuan.⁷ Menurut A. Nunuk, ideologi gender merupakan pola pikir yang membedakan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan kepantasannya.⁸ Dengan kata lain, manusia menciptakan kotak untuk perempuan dan kotak untuk laki-laki sesuai yang diperoleh dari pengalamannya. Dengan ideologi ingin mendesain pikiran, ingatan, sehingga manusia mengingat bahwa antara perempuan dan laki-laki berbeda. Dengan demikian adanya pembakuan paham bahwa antara perempuan dan laki-laki ada diskriminasi. Diskriminasi membentuk suatu pandangan bagaimana seharusnya perempuan dan laki-laki dikonstruksi dalam masyarakat.

Dalam pembahasan ideologi gender ada berbagai variasi pemahaman seperti berikut:

⁶ Kahlijah, “*Konsep Kesetaraan Gender Menurut Siti Musdah Mulia*” (Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Banda Aceh 2015), 13.

⁷ Jainuddin Maliki, *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*, 26.

⁸ Maggie Humm, *Ensiklopedia Feminisme*, (Yogyakarta:Fajar Pustaka Baru, 2007), 215.

1) Gender Sebagai Fenomena Sosial Budaya

Gender merupakan suatu fenomena sosial budaya diartikan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, manusia melakukan klasifikasi, sehingga dengan demikian sesungguhnya gender bukan sesuatu yang asing, karena seringkali melakukan pembedaan meski tanpa kita sadari. Gender sebagai fenomena sosial budaya diartikan sebagai dampak sosial yang muncul dalam suatu masyarakat karena adanya pembedaan atas dasar jenis kelamin. Ini yang dimaksud gender sebagai fenomena sosial budaya, yang melibatkan kita di dalamnya, sadar maupun tidak sadar.⁹

2) Gender Sebagai Suatu Kesadaran Sosial

Pemahaman gender dalam wacana akademik perlu diperhatikan pemaknaannya sebagai suatu kesadaran sosial. Pembedaan *seksual* di masyarakat merupakan konstruksi sosial. Dari sini, masyarakat mulai menyadari bahwa pembedaan tersebut produk sejarah dan kontak warga masyarakat dengan komunitasnya. Manusia kemudian menyadari bahwa ada banyak hal yang perlu diubah agar hidup ini menjadi lebih baik, harmonis, dan berkeadilan.¹⁰

Pada saat ini mungkin tidak disadari, bahwa banyak pelecehan yang dialami oleh perempuan, tapi tidak disadari baik oleh pelaku maupun korban. Tidak semua orang memiliki tingkat sensitivitas yang sama terhadap persoalan gender. Oleh karena itu, gender sebagai kesadaran sosial menjadi penting adanya, dalam kerangka memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender pada setiap level kehidupan.¹¹

3) Gender Sebagai Suatu Persoalan Sosial Budaya

Pembedaan laki-laki dan perempuan sebenarnya bukan menjadi masalah bagi

⁹ Umi Sumbulah, *Spectrum Gender* (Malang: UIN Malang, 2008), 8-9.

¹⁰ Mufidah, *Paradigma Gender*, 5-6.

¹¹ Umi Sumbulah, *Spectrum Gender*, 10.

sebagian besar masyarakat. Perbedaan tersebut menjadi masalah ketika melahirkan ketidakadilan dan ketimpangan, karena jenis kelamin tertentu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari jenis kelamin yang lain. Oleh karena itu, untuk menghapus ketidakadilan gender tidak mungkin dilakukan tanpa melihat akar permasalahannya, yaitu perbedaan atas dasar jenis kelamin.¹²

4) Gender Sebagai Sebuah Konsep Analisis

Dalam ilmu sosial, definisi gender tidak lepas dari asumsi-asumsi dasar yang ada pada sebuah paradigma, dimana konsep analisis merupakan salah satu komponennya. Asumsi-asumsi dasar itu umumnya, merupakan pandangan-pandangan filosofis dan juga ideologis. Gender sebagai sebuah konsep untuk analisis digunakan oleh seorang ilmuwan dalam mempelajari gender sebagai fenomena sosial budaya.¹³

Bahkan Fakih menyebutkan bahwa pemahaman dan perbedaan antar konsep jenis kelamin dan gender sangatlah diperlukan dalam melakukan analisis untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan. Menurutnya hal ini disebabkan ada kaitan yang erat antara perbedaan gender (*gender differences*) dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara luas. Sebagai analisis baru, dibanding dengan analisis sosial lainnya, sebenarnya analisis gender tidak kalah mendasar sebab analisis

¹² Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2011), 338.

¹³ Mufidah, *Paradigma Gender*, 7.

gender justru mempertajam analisis kritis yang ada.¹⁴

5) Gender Sebagai Sebuah Perspektif

Perspektif gender adalah sudut pandang yang dipakai ketika melakukan penelitian, yang berfungsi untuk memahami gejala sosial budaya, dengan asumsi bahwa didalam masyarakat ada perbedaan menurut jenis kelamin. Gender sesungguhnya adalah hasil atau akibat dari *sexual differentiation*. Ada laki-laki dan perempuan, ada *domestic public*, dan sebagainya yang ada dalam kehidupan sosial.¹⁵

b. Kontruksi Sosial Gender Natur dan Netruce

Bicara tentang konstruksi sosial (*social construction*), tidak lepas dari pemikiran Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Untuk memahami realitas, ada upaya yang terkoordinasi dan mengikuti proses pertukaran yang pemikiran yang menjadi karakteristik manusia. Makna (meaning) diproses dan dimaknai oleh pelaku sosial dengan menjadikannya sebagai realitas, yang secara terus menerus dilakukan akan menjadi realitas sosial hasil dari konstruksi makna yang dipahami oleh pelaku sosial. Asumsi yang dikembangkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann melalui *The Social Construction of Reality: A Treatise in Sociological of Knowledge* adalah proses realitas sosial tidak hadir begitu saja, tetapi diterima dan dimaknai melalui sebuah proses dialektis, feedback (timbang-balik) yang berlangsung dalam waktu lama dan berulang kali terjadi antara pelaku sosial.¹⁶

Peter L. Berger dan Thomas Luckmann mengatakan bahwa antara fenomena sosial dalam pemikiran dan tindakan sosial, pada akhirnya

¹⁴ Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, 339.

¹⁵ Umi Sumbulah, *Spectrum Gender*, 11.

¹⁶ Alfirahmi dan retno Ekarsari "Kontruksi Realitas Sosial Perempuan Tentang Gender Dalam Pembentukan Karakteristik Anak Terhadap Pemahaman Gender" (Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI), 253.

muncul realitas sosial. Lebih jauh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann mengatakan bahwa proses sosial tercipta melalui tindakan dan interaksi individu, dimana individu secara intens menciptakan suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif.¹⁷

Konstruksi hadir melalui tindakan dan interaksi individu, secara terus menerus terhadap kenyataan (realitas) yang dimiliki dan dialami bersama dengan individu lain secara subjektif. Makna terkonstruksi secara terus menerus, dan menjadi pijakan bagi individu dalam bertindak, dan makna inilah kemudian yang dipahami sebagai konstruksi sosial. Kenyataan sosial didekati dengan berbagai pengetahuan atau pendekatan, seperti mitologis yang tidak rasional, filosofis yang bercorak moralitas, pengetahuan praktis yang bersifat fungsional, dimana karena penanaman yang dilakukan secara terus menerus, pada akhirnya pengetahuan tersebut membangun struktur dunia akal sehat. Semisal, pekerjaan membersihkan rumah-menyapu, pemahaman bahwa anak perempuan harus menyelesaikan membersihkan rumah-menyapu. Orang tua menciptakan mitologis yang tidak rasional, yang mengatakan bahwa jika anak perempuan tidak menyelesaikan pekerjaan rumah akan jauh dari jodohnya

Gejala sosial yang bersifat intersubjektif memiliki dua dimensi, yaitu obyektif dan subjektif. Masyarakat sebelum memiliki pengetahuan atau pemahaman tentang kehidupannya sendiri, masih berada pada dimensi obyektif. Semua pandangan yang dilihat dalam kehidupan sehari-hari berangkat dari pemikiran pribadi, tanpa ada pengaruh pemikiran luar. Sedangkan pemahaman subjektif merupakan pemahaman dari individu lain di luar

¹⁷ Alfrahmi dan retno Ekarsari "Kontruksi Realitas Sosial Perempuan Tentang Gender Dalam Pembentukan Karakteristik Anak Terhadap Pemahaman Gender", 253.

pemikiran individu. Ketika individu sudah melakukan interaksi dengan orang lain, dan menghasilkan pemahaman berdasarkan kepada pemikiran orang lain, maka itulah yang disebut pemahaman intersubjektif. Kenyataan intersubjektif dalam proses sosialisasi tidak selamanya berlangsung sempurna, karena tidak semua perubahan atau proses mampu diserap individu dengan sempurna. Setiap individu menyerap satu bentuk tafsiran tentang kenyataan-kenyataan sosial secara terbatas, sebagai cermin dari dunia obyektif.

Berger dan Luckmann mengatakan bahwa institusi masyarakat tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia. Meskipun masyarakat dan institusi sosial terlihat nyata secara obyektif, namun pada kenyataannya semuanya dibangun dalam definisi subjektif melalui proses interaksi. Objektivitas baru bisa terjadi melalui penegasan berulang-ulang yang diberikan oleh orang lain yang memiliki subjektivitas yang sama. Pada tingkat generalitas yang paling tinggi, manusia menciptakan dunia dalam makna simbolik yang universal, yaitu pandangan hidupnya yang menyeluruh, yang memberi legitimasi dan mengatur bentuk-bentuk sosial serta memberi makna pada berbagai bidang kehidupan. Intinya, terjadi dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Proses pemaknaan individu terhadap lingkungan dan diluar diri individu adalah sebuah proses eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi yang terjadi antara individu di dalam masyarakat.¹⁸

Berger dan Luckmann menemukan konsep yang menghubungkan antara kenyataan subjektif dan obyektif melalui konsep dialektika, yang dikenal dengan eksternalisasi-objektivasi-internalisasi.

¹⁸ Alfirahmi dan retno Ekarsari "Kontruksi Realitas Sosial Perempuan Tentang Gender Dalam Pembentukan Karakteristik Anak Terhadap Pemahaman Gender", 254.

Eksternalisasi merupakan penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural sebagai produk manusia. Individu-individu dalam proses eksternalisasi mengidentifikasikan dirinya dengan peranan-peranan sosial yang sudah dilembagakan dalam institusi yang sudah ada. Obyektivasi merupakan interaksi sosial yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi atau penanaman simbol. Obyektivasi terjadi melalui penegasan berulang-ulang oleh orang lain, yang memiliki defenisi subjektif yang sama.¹⁹

Individu menciptakan makna simbolik universal, yang digunakan sebagai pandangan hidup secara menyeluruh. Sebagai contoh, pemahaman keagamaan yang melembaga secara terus menerus, pada akhirnya menjelma menjadi ideologi, yang digunakan masyarakat atau individu didalam bertindak dan bersosialisasi dalam kehidupan sehari-hari. Internalisasi sebagai suatu pemahaman atau penafsiran yang langsung dari peristiwa obyektif atau suatu pengungkapan makna, sebagai titik awal individu memahami kehidupan sosial dan menjadi anggota masyarakat. Titik awal dari proses ini adalah kesadaran individu selama internalisasi, dan diikuti dengan proses sosialisasi.

Eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi yang terjadi antara individu di dalam masyarakat, kemudian menghasilkan realitas sosial berupa pengetahuan umum, konsep, kesadaran umum, dan wacana publik. Pengetahuan didefenisikan sebagai kepastian bahwa fenomena adalah riil adanya dan memiliki karakteristik khusus dalam kehidupan kita sehari-hari. Masyarakat menciptakan, membangun dan memelihara makna atau realitas sosial yang disepakati bersama, dan menjadikannya sebagai sebuah pegangan bagi kehidupan sehari-hari. Ini

¹⁹ Alfirahmi dan retno Ekarsari "Kontruksi Realitas Sosial Perempuan Tentang Gender Dalam Pembentukan Karakteristik Anak Terhadap Pemahaman Gender", 254.

menjadikan individu ataupun masyarakat sebagai bagian penting pencipta konstruksi sosial juga menjadi bagian yang terkonstruksi oleh pemikirannya. Ini sejalan dengan pemikiran Waters, bahwa manusia membangun realitas sosial yang menjadi unsur paksaan pada dirinya sendiri.²⁰

1) Konsep Gender

Naomi dalam Free Hearty dan Djazlam Zainal mengatakan bahwa perempuan sebagai manusia biasa, individual, tidak lebih baik dan tidak lebih buruk dibanding laki-laki, dan perempuan mempunyai hak-hak yang setara dengan laki-laki. Kesadaran gender yang dikumandangkan bukan dengan tujuan untuk menginjak laki-laki, tetapi lebih kepada equality (kesetaraan) bukan kesamaan (sameness). Berdasarkan kepada Saptari, pemahaman tentang gender bersumber dari tiga hal, yakni konsensus bersama, ideologi dominan, dan sebagai pengklasifikasian universal. Sebagai konsensus bersama, ideologi gender berasal dari *role expectation* yang merujuk kepada sistem kultural, dimana peran gender disosialisasikan dan dikendalikan dengan pengawasan sosial. Pemahaman gender sebagai ideologi dominan, lahir karena ketetapan sosial dalam pembentukan identitas feminin dan maskulin.

Sedangkan ideologi gender sebagai pengklasifikasian universal, muncul dalam kategori dikotomis, dualistis, yang dianggap saling berlawanan. Universal merupakan tindakan kategori kriteria yang berdasarkan kepada suatu tindakan apakah berlangsung secara umum. Pemahaman gender yang diawali dari pemahaman-pemahaman terhadap perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yang telah berlangsung dalam waktu

²⁰ Basrowi dan Sukidin, *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro* (Surabaya: Insan Cendekia, 2020) 157.

yang cukup panjang, bermuara pada terbentuknya sistem nilai, yang kemudian menjadi pola, tuntutan, bahkan mengikat masyarakat dalam bersikap pada proses sosialnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konstruksi realitas sosial terhadap pola pikir gender dalam pembentukan karakteristik anak, sehingga dalam penelitian konsep gender menjadi pisau bagi peneliti untuk mengukur tentang sejauh mana pemahaman narasumber terkait dengan gender dan pembentukan nilai yang terbentuk.²¹

2) Nature

Secara etimologi nature diartikan sebagai karakteristik yang melekat atau keadaan bawaan pada seseorang atau sesuatu, diartikan juga sebagai kondisi alami atau sifat dasar manusia. Dalam kajian gender, term nature diartikan sebagai teori atau argumen yang menyatakan bahwa perbedaan sifat antar gender tidak lepas dan bahkan ditentukan oleh perbedaan biologis (seks).

Disebut sebagai teori nature karena menyatakan bahwa perbedaan lelaki dan wanita adalah natural dan dari perbedaan alami tersebut timbul perbedaan bawaan berupa atribut maskulin dan feminim yang melekat padanya secara alami. Jadi, seharusnya dalam menyikapi perbedaan yang ada bukan dengan menghilangkannya, melainkan dengan menghapus diskriminasi dan menciptakan hubungan yang serasi. Teori nature akrab dengan ilmuwan klasik dan religius. Terkadang

²¹ Alfirahmi dan retno Ekarsari "Kontruksi Realitas Sosial Perempuan Tentang Gender Dalam Pembentukan Karakteristik Anak Terhadap Pemahaman Gender", 255.

teori ini juga dikaitkan dengan Rousseau, Kant, dan Hegel.²²

Dalam kajian gender, teori ini dipopulerkan oleh Carol Gilligan dan Alice Rossi yang pada akhirnya membelokkan diskursus feminisme ke arah biological essentialisme pasca tahun 1980-an yang ditandai dengan penerimaan kembali konsep perbedaan peran gender. Dibarengi dengan konsep ekofeminisme, argumentasi ini mampu membawa konsep nature menjadi lebih dominan. Para penggagas teori ini bertujuan untuk menciptakan keharmonisan sosial, kesetaraan yang adil dalam keragaman.²³

3) Nurture

Secara etimologi nurture berarti kegiatan perawatan/pe-meliharaan, pelatihan, serta akumulasi dari faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi kebiasaan dan ciri-ciri yang nampak. Terminologi kajian gender memaknainya sebagai teori atau argumen yang menyatakan bahwa perbedaan sifat maskulin dan feminim bukan ditentukan oleh perbedaan biologis, melainkan konstruk sosial dan pengaruh faktor budaya.

Dinamakan nurture karena faktor-faktor sosial dan budaya menciptakan atribut gender serta membentuk stereotip dari jenis kelamin tertentu, hal tersebut terjadi selama masa pengasuhan orang tua atau masyarakat dan terulang secara turun-temurun. Karena adanya faktor budaya didalamnya, argumen ini seringkali juga disebut sebagai konsep culture. Tradisi yang terus berulang kemudian membentuk kesandi masyarakat bahwa hal

²² Moh. Khuza'i, *Problem Definisi Gender: Kajian atas Konsep Nature dan Nurture* (Jurnal Khalimah: Studi Agama dan Pemikiran Islam), 106.

²³ Moh. Khuza'i, *Problem Definisi Gender: Kajian atas Konsep Nature dan Nurture*, 107.

tersebut merupakan sesuatu yang alami. Perbedaan konstruk sosial dalam masyarakat mengakibatkan relatifitas tolok ukur atribut maskulin dan feminim antar budaya.

Sifat tertentu yang dilekatkan pada suatu gender di suatu komunitas belum tentu sama dengan yang lainnya. Dari sinifeminis dan pegiat gender mulai membedakan gender dengan seks dan menyimpulkan bahwa gender dengan definisi barunya adalah sesuatu yang bisa berubah dan dipertukarkan antar jenis kelamin. Perubahan dan pertukaran tersebut menjadi mungkin karena perbedaan tempat, waktu, tingkat pendidikan, kondisi fisik, orientasi seksual, dan lain sebagainya. Definisi baru tersebut juga menjurus pada dekonstruksi norma dan tatanan yang ada.²⁴

Peraturan, kebiasaan, penilaian, dan perlakuan yang di dalamnya terdapat perbedaan dan pembedaan antara lelaki dan perempuan mulai dikaji ulang dengan sudut pandang feminisme dan kesetaraan gender, dari sinilah muncul istilah-istilah semacam ketimpangan gender, bias gender, hegemoni patriarki, sexisme dan misogini. Jadi, menurut mereka kesetaraan secara kuantitatif dan menyeluruh tanpa memandang jenis kelamin adalah satu-satunya solusi dari perbedaan yang terjadi.

Berbeda dengan teori nature yang kebanyakan tokohnya adalah ilmuwan yang agamis, teori nurture diusung oleh pakar ilmu-ilmu humaniora yang cenderung humanis dan dekonstruktifis. Perbedaan metodologi yang digunakan dan juga cara pandang antar tokoh dalam kedua konsep ini menyebabkan perdebatan antara nature dan nurture belum

²⁴ Moh. Khuza'i, *Problem Definisi Gender: Kajian atas Konsep Nature dan Nurture*, 109.

menemukan titik temu dan belum dapat diketahui yang mana pemenangnya.

Perdebatan antara dua konsep ini memiliki pengaruh dominan dalam mewarnai pergerakan feminisme, begitu pula perbedaan dalam memaknai term gender. Keduanya sudah berlangsung kurang lebih selama 50 tahun. Penganut konsep nurture yang didominasi feminis liberal dan sosialis mengklaim bahwa perkembangan teknologi kelak justru akan mampu membuktikan bahwa faktor biologis tidak memiliki peran dalam pembentukan karakteristik manusia serta menghilangkan batas-batas gender dan jenis kelamin. Klaim berbeda diungkapkan penganut konsep nature, menurut mereka feminis penganut nurture justru merendahkan, merugikan, serta melenceng dari tujuan awal feminisme dan kelak akan ditinggalkan oleh perempuan. Namun ada poin yang menarik dari tiga belas agenda manifesto feminis gelombang ketiga, salah satunya mengakui bahwa meskipun ada kemungkinan feminis berseberangan pendapat, namun kesemuanya berbagi tujuan yang sama yakni kesetaraan, dan saling mendukung sesama dalam usaha memperoleh kekuatan untuk menciptakan pilihan. Jadi, seharusnya kedua konsep ini tetap harus dikaji lebih mendalam, bukan secara serta-merta diterima.²⁵

c. Gender dalam Islam

Konsep kesetaraan dan keadilan gender dalam Islam sesungguhnya telah menjadi bagian *substantive* nilai-nilai universal Islam melalui pewahyuan (Al-Quran dan hadits) dari Allah Yang Maha Adil dan Maha Pengasih. Laki-laki dan perempuan ditempatkan pada porsi yang setara untuk kepentingan dan kebahagiaan mereka di dunia

²⁵ Moh. Khuza'i, *Problem Definisi Gender: Kajian atas Konsep Nature dan Nurture*, 110.

maupun di akhirat. Karena itu, laki-laki dan perempuan mempunyai hak-hak dasar dan kewajiban yang sama sebagai hamba Allah, yang membedakan hanyalah ketakwaannya di hadapan-Nya.

Berbicara mengenai kedudukan perempuan, mengantarkan kita agar terlebih dahulu mendudukan pandangan Al-Qur'an. Dalam hal ini, salah satu ayat yang dapat diangkat adalah firman Allah SWT, QS. al-Hujurat [49]: 13 yang berbunyi:

يَتَّيْبُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.(QS. al-Hujurat [49]: 13)²⁶

Ayat tersebut menjelaskan tentang asal kejadian manusia dari seorang laki-laki dan perempuan juga berbicara tentang kemuliaan manusia, baik sebagai laki-laki ataupun perempuan. Yang kemuliannya didasarkan pada ketakwaannya kepada Allah SWT, bukan didasarkan pada suku, keturunan dan bukan pula berdasarkan jenis kelamin. Pandangan yang demikian diperkuat dengan pernyataan M. Quraish

²⁶ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Kaffah*, (Surabaya: PT. Elba Fitrah Mandiri Sejahtera, 2015), 518.

Shihab dalam bukunya *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Mawdu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*” bahwa “tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir dapat dikatakan sama, Allah SWT, telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkannya kepada laki-laki potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan menjadikan keduanya dapat melakukan kegiatan maupun aktivitas yang bersifat umum maupun khusus.²⁷

Al-Qur'an Surah al-Isra' [17]: 70 juga menjelaskan secara jelas tentang kemuliaan manusia tanpa membeda-bedakannya:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْوَجْدِ وَالْبَحْرِ
وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ
خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Artinya: *Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (QS. al-Isra' [17]: 70)²⁸*

Ayat di atas menjelaskan bahwa Bani Adam (anak-anak Adam) adalah makhluk yang dimuliakan, Bani Adam dapat dimaknai manusia seluruhnya, karena semua manusia adalah keturunan Adam, apapun suku bangsa dan laki-laki maupun perempuan. Di dalam al-Qur'an setidaknya terdapat

²⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Mawdu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2004), 299.

²⁸ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Kaffah*, 290

ayat yang menempatkan perempuan pada tiga posisi yakni, sebagai mitra laki-laki.

Secara epistemologis, proses pembentukan kesetaraan gender yang dilakukan Rasulullah SAW tidak hanya dalam wilayah domestik saja, akan tetapi hampir menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat. Seluruh aspek itu meliputi perempuan sebagai ibu, istri, anak, nenek dan maupun sebagai anggota masyarakat, dan sekaligus juga untuk memberikan jaminan keamanan serta perlindungan hak-hak dasar yang telah dianugerahkan oleh Allah.

Sebagaimana dikutip oleh A. Fahrur Rozi ada dua hal atau tradisi yang dibentuk oleh Rasulullah terkait dengan opini masyarakat tentang kesetaraan gender, berikut ini menurutnya, *Pertama*, Rasulullah melakukan perombakan besar-besaran terhadap cara pandang (*word fiew*) masyarakat Arab yang pada masa itu didominasi oleh cara pandang masyarakat era Fir'aun, di mana latar historis yang menyertai konstruk masyarakat ketika itu adalah bernuansa misoginis. Contohnya adalah kebiasaan Rasulullah menggendong putrinya Fatimah di hadapan khalayak umum, yang pada masa itu hal tersebut dianggap tabu. Hal tersebut dinilai oleh Fahrur Rozi sebagai proses pembentukan wacana bahwa laki-laki dan perempuan tidak boleh dibeda-bedakan.²⁹

Kedua, keteladanan Rasulullah terhadap perempuan di sepanjang hidupnya, beliau tidak pernah berbuat kasar terhadap istri-istrinya meskipun di antara istrinya sangat sering terjadi kecemburuan. Teladan yang seperti ini dinilai mengangkat harkat martabat jahiliah di mana perempuan tidak jarang mendapatkan perlakuan berupa tindak kekerasan baik secara fisik maupun psikis³⁰.

Gambaran yang menempatkan perempuan sangat mulia di dalam al-Qur'an dan dari apa yang

²⁹ Mufidah, *Paradigma Gender*, 15.

³⁰ Mufidah, *Isu -Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 14.

dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang tidak terdapat dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Karena adanya peluang perempuan untuk mengembangkan diri sama dengan kaum pria, maka pada masa keemasan Islam banyak ditemukan perempuan-perempuan yang memiliki kecerdasan dan kelebihan yang setara, bahkan melebihi kaum pria. Perempuan dari komunitas lain, seharusnya berterima kasih kepada umat Islam karena secara teologis, Islam telah membawa ajaran yang memuliakan harkat dan martabat kaum perempuan, sehingga kaum perempuan bisa bangkit untuk memajukan dirinya setaraf dengan kemajuan yang telah dicapai kaum pria.³¹ Pada akhirnya, Islam menolak argumentasi yang menghendaki adanya suatu ketidakadilan berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Dalam hal ini, kaum perempuan dianggap sebagai “kaum kelas dua” yang tidak lebih hanya sebagai pelengkap bagi kaum laki-laki.

Namun, al-Qur'an dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah justru memposisikan perempuan sebagai makhluk yang mulia sehingga tidak pantas kemudian dikatakan dan diperlakukan sebagai “kaum kelas dua”. Adapun ketidakadilan terhadap kaum perempuan akibat dari interpretasi atau cara berpikir terhadap teks-teks keagamaan yang menindas, maka hal tersebut bukan menjadi penghalang bagi kaum perempuan untuk menolak atau bahkan melawan demi menuntut haknya sebagai manusia sebab konstruksi akan interpretasi tersebut bukanlah sebuah kodrat Tuhan yang absolut sehingga sangat terbuka untuk diperdebatkan.

d. Persoalan Bias Gender, Ramah Gender, Netral Gender

Ketidakadilan gender merupakan bentuk perbedaan perlakuan berdasarkan alasan gender, seperti pembatasan peran, yang mengakibatkan

³¹ Mufidah, *Isu -Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*, 15.

pelanggaran atas hak-hak dasar.³² Adapun pembahasan mengenai bentuk-bentuk ketidakadilan gender ada baiknya bila membahas sedikit mengenai ketimpangan gender yang terjadi. Ada empat ketimpangan gender yang terjadi *pertama*, laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat dipandang sebagai makhluk yang berbeda dan juga timpang. Bila dilihat secara spesifik perempuan lebih sedikit mendapatkan kesempatan untuk memperoleh sumber material, status sosial dan kekuasaan dibandingkan laki-laki yang lebih leluasa membagi posisi sosial mereka berdasarkan kelas, ras, pekerjaan, suku, agama, dan pendidikan.

Kedua, ketimpangan yang dialami perempuan berdasarkan organisasi masyarakat itu sendiri dari perbedaan biologis. Misalnya lebih mengutamakan kepentingan laki-laki daripada perempuan. *Ketiga*, adanya perbedaan kebutuhan mendalam akan kebebasan diranah publik. Secara situasional perempuan kurang berkuasa dibandingkan laki-laki dalam memenuhi kebutuhan bersama dalam rangka pengakualisasikan diri. *Keempat*, baik laki-laki maupun perempuan dalam menanggapi masalah ketimpangan yang telah terjadi dengan mengarah kepada persamaan derajat maka akan ada upaya dan peluang untuk mengubah situasi ini.³³

Semua bentuk ketidakadilan dan ketimpangan relasi gender di atas pada intinya berpangkal pada bagaimana masyarakat membedakan fungsi dan tanggung jawab sosial, kultural, ekonomi, dan juga religious laki-laki dan perempuan secara seksual dimana laki-laki diposisikan sebagai poros kunci kehidupan. Perbedaan tersebut dibakukan dalam berbagai konstruksi dan diskursus keagamaan dalam format yuridis, teologis, filosofis. Terlepas dari itu

³² Rasyidah, *Ilmu Dakwah Perspektif Gender* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009), 7.

³³ Khalijah, “Konsep Kesetaraan Gender Menurut Siti Musdah Mulia” (Skrripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Banda Aceh 2015), 16.

semua, sebagai manusia baik-baik maupun perempuan harus selalu sabar dan waspada bahwa gender bukan semata-mata persoalan perbedaan, tapi persoalan relasi kekuasaan, subordinasi submisi dan dominasi ketimpangan.³⁴

Bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang sering dialami oleh perempuan antara lain sebagai berikut:

1) Marjinalisasi

Bentuk ketidakadilan gender yang berupa proses marjinalisasi perempuan adalah suatu proses pemiskinan atas satu jenis kelamin tertentu dalam hal ini bentuk, tempat dan waktu serta mekanisme proses marjinalisasi perempuan karena perbedaan gender. Dari aspek sumber misalnya, marjinalisasi atau pemiskinan perempuan dapat bersumber dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsir agama, tradisi atau kebiasaan, bahkan asumsi ilmu pengetahuan perempuan disebabkan oleh perbedaan gender.³⁵

Ada beberapa perbedaan jenis dan marjinalisasi menurut Grijns adalah proses perubahan hubungan kekuasaan antar manusia melalui suatu cara, sehingga salah satu kelompok makin terputus aksesnya ke sumber-sumber daya seperti: tanah, air, modal, pekerjaan, pendidikan, politik dan lain-lain.³⁶ Sedangkan Scoot mendefinisikan bahwa marjinalisasi adalah proses peminggiran kelompok masyarakat oleh kelompok masyarakat lainnya yang mengakibatkan salah satu kelompok tersisihkan.³⁷

Sebagai contoh, dengan hanya mengakui laki-laki sebagai “kepala rumah tangga” tidak

³⁴ Musribul, “ Gender Perspektif Asghar Ali Engineer dan Nasaruddin Umar” (Skripsi Mahasiswa Ushuluddin, Banda Aceh, 2016) 17-18

³⁵ Dwi Narwoko dan suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, 341

³⁶ Nur Aisyah, “Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga”, *Jurnal Muwazah* 5, no.2, (2013):206.

³⁷ Nur Aisyah, “Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga”, 207

memberi ruang bagi kaum perempuan mendapatkan akses kredit, mendapatkan tunjangan keluarga, dan lain-lain, Bentuk-bentuk marjinalisasi perempuan dalam 4 (empat) dimensi: *pertama*, marjinalisasi sebagai proses penyingkiran perempuan dari pekerjaan-pekerjaan produktif yang menghasilkan upah, *kedua* marjinalisasi sebagai proses pemusatan perempuan pada pinggiran pasar kerja atau sektor informal. *Ketiga*, marjinalisasi sebagai proses feminisasi bagi sektor-sektor produktif tertentu, *keempat*, marjinalisasi sebagai suatu proses menuju ketimpangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan.³⁸

2) Steoretipe atau Pelabelan Negatif

Semua bentuk ketidakadilan gender di atas sebenarnya berpangkal pada satu sumber kekeliruan yang sama, yaitu *steoretipe* gender laki-laki dan perempuan. Steoretipe itu sendiri berarti pemberian citra baku atau label/cap kepada seseorang atau kelompok yang didasarkan pada suatu anggapan yang salah atau sesat.³⁹

Misalnya, suatu dugaan bahwa perempuan itu suka bersolek untuk menarik perhatian lawan jenis. Jika terjadi kasus perkosaan, selalu disimpulkan bahwa kejadian tersebut berawal dari label perempuan, tanpa harus menganalisis sisi-sisi lain yang menjadi faktor penyebabnya. Karena itu kasus perkosaan dipandang sebagai kesalahan perempuan. Tidak terkecuali kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, perempuan sering dianggap sebagai penyebabnya, misalnya istri dipukul suami karena cerewet tidak cerdas, atau ditinggal kawin lagi karena ia kurang cantik, tidak dapat bersolek dan sebagainya.⁴⁰

³⁸ Nur Aisyah, "Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga" 206.

³⁹ Siti Rhokimah, "Patriarkisme dan Ketidakadilan Gender", *Jurnal Muwazah* 6, no. 1 (2014): 41.

⁴⁰ Mufidah, *Paradigma Gender* 129.

Label perempuan hanya sebagai pelayan suami telah menempatkan kaum perempuan dalam posisi sebagai pelayan yang selalu dipahami melayani kebutuhan seksual. Label ini merupakan bentuk ketidakadilan sosial, sebab label pencari nafkah selalu didominasi kaum laki-laki telah menempatkan posisi perempuan lebih rendah. Sementara jika seorang istri bekerja diluar negeri dengan suami pengangguran yang kerjanya hanya menghabiskan uang hasil kerja istrinya ini, tidak mendapatkan label pencari nafkah.

Hal ini tidak saja mempersulit perempuan untuk berkreasi dan mengembangkan potensi diri, tetapi juga menyulitkan perempuan untuk keluar dari garis batas pencitraan negatifnya

3) Subordinasi

Subordinasi perempuan adalah sikap, perilaku ataupun pemahaman yang meyakini bahwa jenis kelamin laki-laki lebih utama dan dominan sehingga lebih sesuai untuk mendapatkan peran penting dibandingkan dengan jenis kelamin perempuan. Penempatan salah satu jenis kelamin lainnya dari aspek status, peran dan relasi yang tidak setara. Pandangan subordinat ini didasarkan pada *stereotype* gender yang dapat menghambat akses partisipasi dan kontrol, terutama yang berhubungan dengan peran pengambilan keputusan dan pemanfaatan sumber daya.⁴¹

Banyak anggapan bahwa perempuan itu irasional, emosional sehingga tidak dapat memimpin. Oleh karena itu tidak layak ditempatkan pada posisi yang tidak penting. Sebagai contoh dalam sebuah keluarga yang keuangan mereka sangat terbatas, dan harus mengambil keputusan untuk memilih siapa yang harus didahulukan, maka anak laki-laki akan

⁴¹ Mufidah , *Bingkai Sosial Gender* (Malang: Uin Maliki Press, 2010), 8.

menjadi pilihan utama. Kenyataan seperti inilah sesungguhnya ketidakadilan gender. Praktik seperti ini sesungguhnya karena kurang adanya atau bahkan tidak adanya kesadaran gender yang berkeadilan.⁴²

4) Kekerasan (*violence*)

Salah satu bentuk ketidakadilan gender lainnya adalah tindakan kekerasan terhadap perempuan, baik yang berbentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomis, dan seksual. Kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk perilaku yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, atau emosional pada perempuan. Hal ini bisa terjadi dalam berbagai konteks, termasuk dalam hubungan pasangan, keluarga, pekerjaan, atau masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan dapat berupa pelecehan seksual, pemerkosaan, pelecehan verbal, penganiayaan fisik, atau tindakan diskriminatif lainnya yang mengakibatkan perempuan merasa terancam, takut, dan tidak aman. Kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan memerlukan tindakan untuk pencegahan dan penanggulangannya.

Kekerasan itu timbul akibat beberapa faktor di atas, termasuk anggapan bahwa laki-laki pemegang supremasi dan dominasi terhadap berbagai sektor kehidupan. Fenomena itu oleh masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang sangat wajar jika perempuan menerima perlakuan tersebut. Kekerasan terhadap perempuan mempunyai beberapa tingkatan, yaitu: *pertama* pelecehan dengan sentuhan maupun ungkapan yang merendahkan martabat perempuan, *kedua* pemerkosaan, *ketiga* pemukulan, penganiayaan, dan pembunuhan, *empat* prostitusi sebagai bentuk eksploitasi perempuan, *lima* pornografi sebagai

⁴² Umi Sumbulah, *Spectrum Gender*, 15.

bentuk pelecehan, *enam* eksploitasi perempuan pada dunia kerja dan hiburan, *tujuh* pemaksaan alat kontrasepsi KB yang tidak cocok untuk istri.⁴³

5) Beban ganda

Beban ganda adalah beban yang harus ditanggung oleh perempuan secara berlebihan. Berbagai observasi menunjukkan perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga. Sehingga bagi mereka yang bekerja, selain bekerja ditempat kerja, juga masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Sosialisasi peran gender seperti itu menimbulkan rasa bersalah dalam diri perempuan jika tidak menjalankan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Sedangkan bagi kaum laki-laki tidak saja merasa bukan tanggung jawabnya, bahkan dibanyak tradisi laki-laki dilarang terlibat dalam pekerjaan domestik.⁴⁴

Selanjutnya dalam masyarakat muncul banyak respons berkaitan dengan hubungan laki-laki dan perempuan dalam konteks gender yang memunculkan persoalan bias gender, ramah gender dan gender netral. Adapun penjelasan istilah sebagai berikut:

a) Bias Gender

Kata bias dalam istilah bias gender berasal dari bahasa Inggris dengan arti "*often supporting or opposing a particular person or thing in an unfair way by allowing personal opinions to influence your judgment*" atau pemihakan terhadap suatu pihak secara tidak adil. Jadi pengertian bias dapat terjadi karena faktor-faktor yang ada pada diri pengamat itu sendiri. Usaha untuk mencegah terjadinya bias dapat dilakukan

⁴³ Mufidah, *Paradigm Gender*, 130.

⁴⁴ Nanang Hasan Susanto, "Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Budaya Patriarki", *Jurnal Muwazah7*, no. 2 (2015): 124.

dengan latihan pada mereka yang akan bertindak.⁴⁵

Bias gender adalah pembagian posisi dan peran yang tidak adil antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dengan sifat feminin dipandang selayaknya berperan di sektor domestik, sebaliknya laki-laki yang maskulin sudah sepatutnya berperan di sektor publik.

Seperti kasus adanya perusahaan-perusahaan yang masih "menganakemaskan" kaum pria dan menutup peluang bagi kesetaraan perempuan dalam hal gaji, penugasan, dan promosi, seperti kasus Citigroup yang akhirnya digugat oleh enam eksekutif perempuan. Jika sebuah bahasa dikatakan bias gender, itu berarti bahwa bahasa tersebut memihak salah satu gender tertentu dengan satu dan lain cara. Hal ini biasanya muncul dalam bentuk adanya kecenderungan orientasi laki-laki, mempertahankan diskriminasi yang tidak adil, dan mendorong pada sikap merendahkan peran wanita dalam masyarakat.⁴⁶

Bias gender terjadi apabila salah satu pihak dirugikan, sehingga mengalami ketidakadilan. Yang dimaksud ketidakadilan disini adalah apabila salah satu jenis gender lebih baik keadaan, posisi, dan kedudukannya. Bias gender tersebut bisa saja terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi khususnya di Indonesia, bias gender ini lebih dirasakan oleh kaum perempuan.

⁴⁵ Rizky Taufik Favian, "Analisis Gender Terhadap Ilustrasi Teks Dan Ilustrasi Gambar Dalam Buku Pelajaran Bidang Studi Akidah Akhlak Mts Kelas IX Penerbit Kementerian Agama Tahun 2016" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020), 11.

⁴⁶ Rizky Taufik Favian, "Analisis Gender Terhadap Ilustrasi Teks Dan Ilustrasi Gambar Dalam Buku Pelajaran Bidang Studi Akidah Akhlak Mts Kelas IX Penerbit Kementerian Agama Tahun 2016", 12

Sebenarnya ketimpangan gender yang merugikan perempuan itu, secara tidak langsung dapat merugikan masyarakat secara menyeluruh. Apabila perempuan diposisikan tertinggal, maka perempuan tidak dapat menjadi mitra sejajar laki-laki, sehingga hubungan kedua pihak akan menjadi timpang. Akibatnya, terjadilah ketidakserasian dan ketidakharmonisan dalam kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan, baik dalam lingkungan kehidupan berkeluarga maupun dalam lingkungan kehidupan masyarakat secara umum. Lebih jauh lagi dengan semakin tingginya tuntutan, kesadaran, dan kebutuhan perempuan terhadap pengembangan diri, timbullah konflik, karena perempuan membutuhkan kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas dirinya. Munculnya bias gender ini (lebih banyak menimpa perempuan) diakibatkan oleh nilai-nilai dan norma-norma masyarakat yang membatasi gerak langkah perempuan serta pemberian tugas dan peran yang dianggap kurang penting dibandingkan jenis gender lainnya (laki-laki). Sehingga dalam pengambilan keputusan, kepemimpinan, kedudukan yang tinggi, dsb. sedikit sekali diberikan kepada perempuan.

Bias gender juga terlihat secara jelas dalam banyak program intervensi dan pengembangan usaha kecil yang biasanya cenderung lebih mengutamakan kelompok laki-laki sebagai pemilik usaha. pada program dan intervensi untuk sektor-sektor yang diasumsikan sebagai sektor yang feminim. Dalam bidang-bidang kehidupan lainnya, seperti politik, ekonomi, media massa, pendidikan, dan kemasyarakatan, perempuan masih tetap jauh ketinggalan dari laki-laki.

Di bidang pekerjaan produktif, perempuan masih lebih banyak yang menekuni bidang perempuan (feminim), seperti keguruan, keterampilan, kesekretarian. Sedangkan dalam program-program pembangunan, perempuan masih kurang memiliki kesempatan dan peran, baik sebagai penentu kebijakan, agen pembangunan (pekerja pembangunan), maupun peserta aktif. Biasanya perempuan hanya menerima manfaat pembangunan secara tidak langsung, yaitu dari suaminya. Walaupun demikian, perjuangan kesetaraan gender ditujukan kepada penguatan laki-laki dan perempuan, dengan kondisi yang dialami dalam suatu masyarakatnya.

Menyikapi permasalahan kesetaraan laki-laki dan perempuan (gender) memang merupakan suatu keharusan. Memperjuangkan kesetaraan ini merupakan perhatian yang harus diperjuangkan berbagai pihak, apakah pihak pengambil kebijakan (pemerintah), lembaga swadaya masyarakat, maupun unsur-unsur lain sebagai *stakeholder* (pelaku) itu sendiri melalui pemantapan kelembagaan secara maksimal demi terwujudkan pembangunan yang adil dan setara bagi laki-laki dan perempuan.

b) Ramah Gender

Ramah gender adalah perilaku kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional, serta mendapatkan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Contohnya adalah perempuan

bebas jadi pemimpin dan bebas berkompetisi dalam dunia perpolitikan.⁴⁷

c) Netral Gender

Non-binary alias *non biner* atau bisa disebut juga gender netral adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan seseorang yang tidak mengidentifikasi dirinya secara eksklusif sebagai laki-laki atau perempuan. Sebaliknya, mereka bisa menentukan identitas dan pengalaman gendernya sendiri, di luar konsep biner yang berkembang selama ini. *Non-binary* adalah konsep yang terpisah dengan orientasi seksual seseorang maupun jenis kelamin yang ditetapkan sejak lahir.

Namun pada praktiknya, ada yang mengaitkannya dengan agender, androgini maupun genderqueer. Tak heran banyak yang kemudian kebingungan untuk membedakannya maupun aplikasinya. Cara terbaik adalah memastikan kepada yang bersangkutan untuk mengetahui bagaimana mereka ingin diidentifikasi dan terminologi apa yang harus dipakai. Identitas biner Bagi banyak orang, identitas gendernya berlaku sesuai dengan jenis kelamin yang ditetapkan saat dilahirkan. Biasanya ini ditentukan berdasarkan faktor fisik seperti anatomi organ reproduksi eksternal sehingga bisa dikategorikan sebagai laki-laki atau perempuan. Konsep inilah yang lalu dikenal dengan biner seks.⁴⁸

⁴⁷ Rizky Taufik Favian, "Analisis Gender Terhadap Ilustrasi Teks Dan Ilustrasi Gambar Dalam Buku Pelajaran Bidang Studi Akidah Akhlak Mts Kelas IX Penerbit Kementerian Agama Tahun 2016", 13.

⁴⁸ Rizky Taufik Favian, "Analisis Gender Terhadap Ilustrasi Teks Dan Ilustrasi Gambar Dalam Buku Pelajaran Bidang Studi Akidah Akhlak Mts Kelas IX Penerbit Kementerian Agama Tahun 2016", 15.

2. IPNU-IPPNU Salah Satu Banom Ormas NU

a. Sejarah Singkat NU dan IPNU-IPPNU

1) Sejarah NU

Sebelum membahas lebih jauh mengenai latar lahirnya Nahdlatul Ulama, perlu penulis kemukakan terlebih dahulu bahwa Nahdlatul Ulama merupakan pengusung Islam tradisional di Indonesia. Istilah tradisional memiliki dua makna; satu bersifat merendahkan sementara yang lain netral. *Pertama*, istilah tradisional berarti merendahkan jika digunakan dengan merujuk pada model kuno muslim dari desa tradisional dalam agama, intelektual konservatif, oportunistik politik dan budaya sinkretik.⁴⁹ *Kedua*, pemahaman yang lebih umum tentang muslim tradisional menunjukkan bahwa mereka adalah sekelompok orang yang percaya bahwa muslim yang tidak memiliki keahlian yang cukup untuk melakukan ijtihad harus mengambil salah satu dari empat mazhab hukum dan mengadopsi pendekatan yang bertahap dan toleran untuk berdakwah ketika berurusan dengan lokal tradisi. Fakta bahwa praktik Islam kadangkala tampaknya dicampur dengan tradisi lokal tidak berarti bahwa mereka menganggap tradisi lokal sebagai tradisi Islam; alih-alih itu hanya masalah pendekatan.⁵⁰

Keunikan kelahiran NU terletak pada waktu dan karakter kemunculannya. Dalam hal waktu, pendirian NU tidak bisa dilihat hanya dari apa yang terjadi selama pendiriannya. NU telah ada selama lebih dari 93 tahun, tetapi masih mempertahankan karakter awalnya, meskipun maraknya perubahan sosial-politik di

⁴⁹ Jauhar Fuad A, Akar Sejarah Moderasi Islam Pada Nahdlatul Ulama, *Jurnal Tribakti*. no. 1 (2013), 157

⁵⁰ Jauhar Fuad A, Akar Sejarah Moderasi Islam Pada Nahdlatul Ulama, 157

Negara ini. Selama 25 tahun, NU berada di bawah kekuasaan penjajah Belanda dan Jepang, 20 tahun di bawah pemerintahan Soekarno, lebih dari 32 tahun di bawah rezim Soeharto, dan sekarang di bawah proses demokratisasi Indonesia yang sedang berlangsung.

NU didirikan setelah sejumlah organisasi keagamaan dan organisasi Nasional berkembang dengan motif masing-masing. Organisasi-organisasi ini didirikan ketika Indonesia berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Selama masa ini, gerakan muslim berperang melawan penjajah yang juga membawa Agama Kristen dan menentang praktik dan interpretasi Islam di antara mereka.⁵¹ Gerakan muslim dimaksud adalah gerakan yang didorong dan diikuti oleh orang-orang yang beragama Islam meskipun minat mereka berbeda satu sama lain.

Kepentingan yang diangkat oleh organisasi-organisasi ini lebih fokus pada masalah ekonomi, agama dan etnis. Contoh yang bagus dari organisasi komunitas (kelompok berbasis etnis) adalah Jam'iyat Khair. Meskipun Jam'iyat Khair terbuka untuk setiap Muslim, pendiri dan pemimpin dan mayoritas pengikutnya khususnya adalah orang Arab kaya yang menganggap muslim Arab secara agama "lebih unggul" dari pada muslim non-Arab. Mereka mengatakan *nahnu hadramiyyun 'ala kulli syai* (kami adalah Hadrami di atas segalanya), sebagaimana dinyatakan oleh Al-Bashir.

Inisiatif kiai untuk membentuk NU sebenarnya lebih merupakan respons terhadap perkembangan politik eksternal. Dalam ajaran

⁵¹ Jauhar Fuad A, *Akar Sejarah Moderasi Islam Pada Nahdlatul Ulama*,

lain, perkembangan internasional telah mengarah pada pembentukan NU, sementara keadaan sosial-keagamaan dan politik Negara ini hanya bagian dari alasan untuk mendirikan organisasi ini. Salah satu faktor terpenting yang mengarah pada pembentukan NU adalah masalah representasi dalam melindungi kepentingan Muslim tradisional yang merasa terancam oleh kebangkitan gerakan Wahhabi dan keinginan mereka untuk berpartisipasi dalam memecahkan masalah yang terus-menerus dihadapi oleh umat Islam. Ancaman Wahhabisme di Makah dan sekitarnya untuk menghancurkan banyak tradisi adalah alasan langsung untuk pembentukan NU. Bagi Muslim tradisional, ada kebutuhan mendesak untuk membentuk persatuan dan kekuatan di antara mereka.

Istilah nahdhah pertama kali digunakan dalam konteks studi NU ketika Wahab Chasbullah dan Mas Mansour mendirikan madrasah bernama Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Nasional) pada tahun 1916 (Madrasah ini nantinya akan dimasukkan ke dalam Muhammadiyah). Pada tahun 1918, Wahab Chasbullah menjadi salah satu pedagang muslim yang mendirikan Nahdlatul Tujjar (Kebangkitan Pedagang). Dalam asosiasi ini ia memegang posisi bendahara. Asosiasi ini digunakan untuk menghubungkan jaringan perdagangan di berbagai masyarakat Islam tradisional.

Pada tahun yang sama (1918), bersama dengan KH. Akhmad Dachlan dari Kebondalem (untuk membedakannya dari pendiri Muhammadiyah), ia mendirikan kelompok diskusi muslim bernama Taswirul Afkar, yang secara longgar berarti 'konstelasi

pemikiran'.⁵² Kelompok diskusi ini mengadakan debat reguler tentang masalah agama, seperti masalah ijtihad dan taqlid (mengikuti interpretasi hukum ulama). Kegiatan Taswirul Afkar memiliki kemiripan dengan *Jiurnal des Dbats*,²⁴ sebuah jurnal yang diterbitkan di Paris di mana ada perdebatan antara al-Afghani dan Ernest Renan tentang masalah hubungan Islam dan sains. Jurnal ini tidak hanya dapat diakses di Timur Tengah, tetapi juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab.

Perkembangan dunia Islam ditandai oleh dua peristiwa penting, yaitu: pertama, Khalifah Abdul Majid digulingkan dari posisinya oleh Mustafa Kamal (pemimpin nasionalis Turki). Turki menyerahkan urusan khilafah kepada umat Islam di seluruh dunia. Menanggapi perkembangan Kairo di bawah kepemimpinan Syaikh al Azhar akan mengadakan pertemuan internasional untuk membahas khilafah. Kedua, penaklukan Mekah oleh Abdul Aziz bin Su'ud yang didukung oleh Wahhabi dari kekuatan Syarif Husain. Steenbink menyebut perang di Semenanjung Arab sebagai "perang Wahabi".

Kemenangan Ibnu Su'ud membuat masalah Wahabi menguat lagi setelah dilemahkan oleh hasil keputusan kongres Surabaya yang memposisikan Muhammadiyah dan al-Irsyad bukan Wahhabi. Reputasi Wahabi, yang dikenal radikal, dogmatis, dan tidak mengenal kompromi, membuat kaum tradisionalis khawatir bahwa kemenangan mereka akan diikuti dengan pemberantasan tradisi agama dari tanah Hijaz, meskipun Hijaz bukan hanya tujuan ibadah tetapi juga ilmiah. Kekhawatiran itu menjadi kenyataan,

⁵² Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama ; Sejarah NU 1952-1967* (Lkis Pelangi Aksara, 2012). 48

pemerintah Arab Saudi saat itu mulai menghancurkan peninggalan sejarah Islam melarang tradisi agama dan selalu menghalangi madzhab selain madzhab Wahabi, terutama empat madzhab. Untuk mendapatkan pengakuan dari komunitas internasional sebagai satu-satunya penerus dunia Islam, mereka mengundang negara-negara Muslim atau jemaat dari seluruh dunia (termasuk Indonesia) untuk menghadiri konferensi Khilafah di Arab Saudi, meskipun akhirnya gagal.⁵³

Ulama Indonesia sangat menolak tindakan penguasa Arab Saudi. Ulama pesantren yang terlibat dalam delegasi ulama Islam Indonesia yang akan menghadiri konferensi khilafah untuk mencari pengalaman untuk menyampaikan pesan dari mereka yang mewakili Indonesia ke Negara baru Arab Saudi. Namun, ini terhambat oleh penolakan berbagai kelompok Islam lainnya dengan alasan bahwa pesantren tidak memiliki organisasi seperti Muhammadiyah, Syarikat Islam, dan lainnya.⁵⁴ Kemudian para ulama membentuk asosiasi yang disebut Syubbanul Wathan, untuk membahas isu-isu hukum agama, program dakwah, peningkatan pengetahuan dan lain-lain.⁵⁵

Forum kongres Islam ke-4 di Yogyakarta memutuskan bahwa delegasi kongres Makkah adalah HOS Cokroaminoto dari SI (Syarekat Islam) dan Mas Manshur dari Muhammadiyah. Sementara itu kandidat yang terpisah dari Islam tradisional K.H Abdul Wahab Hasbullah dijatuhkan dari delegasi ke Makkah. Latar

⁵³ Abdul Muchith Muzadi, *NU Dalam Perspektif Sejarah Dan Ajaran: Refleksi 65 Th. Ikut NU* (Surabaya: Khalista, 2006), 33.

⁵⁴ Abdul Muchith Muzadi, *NU Dalam Perspektif Sejarah Dan Ajaran: Refleksi 65 Th. Ikut NU* 34.

⁵⁵ Andree Feilliard, *NU Vis-a-Vis- Negara* (Yogyakarta: LKiS, 1999), 10.

belakang penolakan ini telah memicu antusiasme para pesantren untuk menunjukkan kemandirian dan kekuatan mereka. Tekad untuk mengirim sendiri delegasi pesantren dengan nama Komite Hijaz yang digunakan untuk menghadapi Arab Saudi. Pembentukan acara Hijaz di desa Kertopaten Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926 dan hadir di Majelis termasuk Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari, KH Abdul Wahab Hasbullah, KH Bishri Syansuri, K. Raden Asnawi, KH Ma'shum, KH Nawawi, KH Ridlwan, KH Faqih dan KH Abdul Halim.

Ketua Komite Hijaz yang dipimpin oleh Hasan Gipo dibantu oleh mbah Shodiq, dan sebagai juru bicara adalah K.H Abdul Wahab Hasbullah, Sheikh Ghanaim al Mishri dan Kyai Dahlan (Kertosono) yang saat ini belajar di Hijaz sebagai pendamping. Tuntutan yang diajukan oleh panitia Hijaz adalah: (1) kebebasan bermadzhab; (2) penjelasan tentang hukum yang berlaku di Hijaz; (3) tarif Haji; (4) mempertahankan tempat-tempat bersejarah, termasuk makam Nabi dan Sahabat Nabi; dan (5) menjawab surat yang diajukan dua utusan.⁵⁶

Raja Sa'ud menanggapi permohonan itu, terutama dengan kebebasan bermadzhab. Juga tidak ada yang disebutkan dalam surat balasan Raja Sa'ud. Pada saat perkembangannya, kebebasan untuk mengajar dan mempraktikkan berbagai madzhab di Masjid al-Haram dan masjid Nabawi tidak memiliki kompilasi keseragaman di Haramain. Ulama yang mengajar dan mempraktikkan aliran pemikiran Syafi'i karena hanya bisa dilakukan di rumah.⁵⁷ Komite Hijaz ini pada akhirnya oleh K.H.

⁵⁶ Jauhar Fuad A, *Akar Sejarah Moderasi Islam Pada Nahdlatul Ulama*,160

⁵⁷ Jauhar Fuad A, *Akar Sejarah Moderasi Islam Pada Nahdlatul Ulama*,158

Hasyim Asy'ari diganti namanya menjadi Nahdlatul Ulama (NU).

Kedekatan ulama satu sama lain membantu mempercepat proses rekonsiliasi umat Islam di nusantara. Ulama Islam membentuk organisasi sebagai wadah untuk mempertahankan dan mengembangkan ajaran Islamahlussunnah wal jama'ah, dan mewujudkan cita-cita “izzul al Islam wa al muslimin”. Dengan demikian NU dan pesantren memiliki hubungan yang sangat erat. Hubungan antara keduanya seperti hubungan anak dengan orang tua. Karena NU lahir dari rahim pesantren. NU lahir dari ulama pesantren di Jawa yang memiliki hubungan emosional yang sangat kuat di antara mereka.⁵⁸

Kebanyakan ulama memiliki hubungan yang melebihi ruang lingkup tempat tinggal mereka. Melalui hubungan perkawinan dan kekeluargaan, jaringan transmisi pengetahuan dan keramahan, atau melalui organisasi, para ulama memperkuat keberadaan pesantren mereka. Kesamaan ini menghasilkan homogenitas kehidupan, budaya dan praktik keagamaan di lingkungan pesantren, sehingga pantas disebut subkultur, yaitu subkultur pesantren di tengah masyarakat Indonesia.⁵⁹ Subkultur ini terinspirasi oleh Aswaja Islam. Sub budaya inilah yang menjadi modal dan dasar utama pembentukan NU.

Pada konferensi NU 1928 Anggaran Dasar/AD dirumuskan, dalam tujuan organisasi itu dinyatakan untuk memegang teguh pada salah satu dari empat Imam Madzhab, Imam Muhammad bin Idris al-Syaf'i, Imam Malik

⁵⁸ Jauhar Fuad A, *Akar Sejarah Moderasi Islam Pada Nahdlatul Ulama*,159

⁵⁹ Jauhar Fuad A, *Akar Sejarah Moderasi Islam Pada Nahdlatul Ulama*,159

bin Anas, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal.⁶⁰ Berdasarkan paparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan utama pendirian NU adalah untuk melindungi umat Islam di Indonesia, yang sejak masuknya Islam di Indonesia telah mengadopsi ahlussunnah wal jama'ah dari serangan Wahabi. Berikutnya dinyatakan bahwa NU didirikan dengan tujuan mempertahankan, melestarikan, mengembangkan dan mempraktikkan ajaran Islam dengan mayoritas ahlussunnah wal jama'ah dan berpegang pada salah satu dari empat madzhab; Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris as Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, untuk menyatukan langkah-langkah ulama dan pengikut mereka dalam melaksanakan kegiatan yang bertujuan menciptakan kemakmuran masyarakat, kemajuan bangsa, martabat manusia yang tinggi dan bermartabat.

2) Sejarah IPNU-IPPNU

Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) adalah organisasi yang berada di bawah naungan jami'iyah Nahdlatul Ulama (NU). IPNU merupakan tempat berhimpun, wadah komunikasi, akulturasi dan kaderisasi pelajar-pelajar NU. Selain itu, IPNU juga merupakan bagian integral dari potensi generasi muda Indonesia yang menitikberatkan bidang garapannya pada pembinaan dan pengembangan remaja, terutama kalangan pelajar.⁶¹

Munculnya organisasi IPNU bermula dari adanya jam'iyah yang bersifat lokal atau

⁶⁰Jauhar Fuad A, *Akar Sejarah Moderasi Islam Pada Nahdlatul Ulama*, 161

⁶¹ Afandi Ahmad, "Peran Ikatan Pelajar Nahdhatul Ulama-Ikatan Pelajar Putri Nahdhatul Ulama dalam Pemberdayaan Pemuda Melalui Pendidikan di Desa Adiwerna Tegal" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulla Jakarta, 2017), 43.

kesederhanaan. Wadah yang berupa kumpulan pelajar dan pesantren tersebut tumbuh diberbagai daerah hampir di seluruh wilayah Indonesia yang mewadahi pelajar dan santri NU. Diawali dengan sebuah perkumpulan yang bernama Tsamarotul Mustafidin di Surabaya (1936), PERSANO (Persatuan Santri Nahdlatul Oelama), PERPENO (Persatuan Pelajar Nahdlatul Oelama, 1953) di Kediri, IPINO (Ikatan Pelajar Nahdlatul Oelama) tahun 1954 di medan, dan lain sebagainya.

Organisasi-organisasi tersebut masih bersifat lokal dan tidak saling terikat. Masing-masing organisasi masih bersifat kedaerahan dan tidak mengenal satu sama lain. Meskipun ada perbedaan nama organisasi, tetapi aktivitas dan haluannya sama yaitu melaksanakan faham atau ajaran Islam ahlussunah wal jamaah. Titik awal inilah yang merupakan sumber inspirasi dari perintis pendiri IPNU untuk menyatukan langkah dalam membentuk sebuah perkumpulan.

Melihat kondisi yang demikian, muncul gagasan untuk menyatukan organisasi-organisasi tersebut yang waktu itu dipelopori oleh Tolhah Mansur, Fadlan, Musahal sofyon Kholil dan Abdul Ghani Farid yang semuanya adalah mahasiswa. Mereka memandang perlunya penyatuan berbagai organisasi pelajar NU dalam satu wadah yang solid.

Akhirnya setelah melalui pembicaraan dan lobi antarkomponen. Semua sepakat untuk menyatukan organisasi-organisasi santri dan pelajar NU dalam satu wadah besar. Maka pada tanggal 20 Jumadil Akhir 1373 H atau tanggal 24 Februari 1954 secara resmi berdirilah IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama). Sejak saat itu, upaya pengembangan terus dilakukan hingga berdirilah lima cabang yang dikenal dengan “Panca Daerah” (Jombang, Solo,

Kediri, Semarang, dan Yogyakarta) yang kemudian mencestukan konferensi segi lima dengan keputusan yang pertama adalah peraturan dasar dan peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) IPNU. Kedua adalah menetapkan Tolhah Mansur menjadi ketua umum IPNU.⁶²

Pada kongres VI di Surabaya, IPNU menjadi badan otonom NU (Nahdlatul Ulama) sehingga berhak mengatur rumah tangganya sendiri dan tidak lagi tergantung kepada kebijakan LP Ma'rif. Pada perkembangan selanjutnya, IPNU berubah nama menjadi ikatan Putra Nahdlatul Ulama saat kongres ke-X di Jombang. Organisasi pelajaran yang diakui pemerintah hanya OSIS sebagai organisasi intra sekolah dan Pramuka sebagai organisasi ekstra sekolah, sehingga ladang garap IPNU tidak hanya pelajar dan santri saja, tetapi juga pemuda, remaja, dan mahasiswa.

Pada kongres XIV tanggal 18-24 juni 2003 di Surabaya, IPNU sepakat untuk kembali ke habitatnya semula dengan berganti nama menjadi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dengan orientasi pelajar, santri dan mahasiswa.

Lahirnya Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dilatar belakangi adanya kebutuhan wadah pengkaderan bagi generasi muda NU yang bersumber dari kalangan pesantren dan pendidikan umum. IPNU diharapkan dapat berkiprah di berbagai bidang, baik politik (kebangsaan), birokrasi, maupun bidang-bidang profesi lainnya.⁶³

Pada awalnya, embrio organisasi ini adalah berbagai organisasi atau asosiasi pelajar dan santri NU yang masih bersifat lokal dan parsial. Setelah terbentuk IPNU yang

⁶² Rofik Kamilun dkk., *Buku Saku IPNU dan IPPNU* (Semarang: Adi Offset, 2003) 21

⁶³ Rofik Kamilun dkk., *Buku Saku IPNU dan IPPNU*, 23

anggotanya hanya pelajar dan santri putra saja, maka Umroh Mahfodhoh, mahasiswa UGM mengadakan musyawarah di pondok pesantren Muallimat Solo untuk membentuk wadah bagi pelajar dan santri putri NU. Pada tanggal 8 Rajab 1374 atau 2 maret 1955 IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama) resmi didirikan.⁶⁴

b. Menenal Ke-Organisasian IPNU-IPPNU

1. Visi IPNU dan IPPNU

a. Visi IPNU dan IPPNU

Terbentuknya putra dan putri bangsa yang bertaqwa kepada Allah SWT, berilmu, berakhlak, mulia, berwawasan kebangsaan, serta bertanggung jawab atas tegak dan terlaksananya syariat Islam menurut paham ahlusunnah wal jama'ah yang berdasarkan pancasila dan Undang-undang dasar 1945 dan pendidikan untuk pemberdayaan kaum muda pelajar dan santri

b. Misi IPNU dan IPPNU

- 1) Menghimpun dan membina pelajar Nahdhatul Ulama (NU) dalam satu wadah organisasi IPNU dan IPPNU
- 2) Mempersiapkan kader-kader intelektual sebagai penerus perjuangan bangsa
- 3) Menyusun landasan program perjuangan sesuai dengan perkembangan masyarakat
- 4) Mengusahakan jalinan komunikasi dan kerjasama program dengan pihak lain selama tidak merugikan organisasi⁶⁵

⁶⁴ Afandi Ahmad, "Peran Ikatan Pelajar Nahdhatul Ulama-Ikatan Pelajar Putri Nahdhatul Ulama dalam Pemberdayaan Pemuda Melalui Pendidikan di Desa Adiwerna Tegal" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulla Jakarta, 2017)46

⁶⁵Rofik Kamilun dkk., *Buku Saku IPNU dan IPPNU*, 47

2. Tujuan organisasi IPNU-IPPNU

Tujuan organisasi IPNU-IPPNU berpijak pada kemestaaan organisasi dan anggotnya untuk senantiasa menempatkan pergerakan pada zona keterpelajaran dengan kaidah belajar, berjuang, dan bertaqwa yang bercorak dasar dengan wawasan kebangsaan, keislaman, keilmuan, kekaderan, dan keterpelajaran.

- 1) Wawasan kebangsaan adalah wawasan yang dilandasi oleh asas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan yang mengakui kebhinekaan sosial budaya, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, serta kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara berlandaskan prinsip keadilan, persamaan dan demokrasi.
- 2) Wawasan keislaman adalah wawasan yang menempatkan ajaran Islam sebagai sumber motivasi dan inspirasi dalam memberikan makna dan arah pembangunan manusia, sehingga IPNU dalam bermasyarakat bersikap:
 - a) *I'tidal* yakni menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kejujuran serta bersikap membangun dan menghindari tindakan kedhaliman
 - b) *Tasamuh* yaitu toleran terhadap perbedaan pendapat
 - c) *Tawazun* yaitu seimbang dalam menjalin hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan lingkungannya.
 - d) *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* yaitu memiliki kecenderungan untuk melaksanakan usaha perbaikan, mencegah kerusakan harkat manusia dan kerusakan lingkungan, serta bertanggung jawab dalam bersikap dan bertindak.

- 3) Wawasan keilmuan adalah wawasan yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai alat untuk mengembangkan kecerdasan anggota dan kader
- 4) Wawasan kekaderan adalah wawasan yang menempatkan organisasi sebagai wadah untuk membina anggota agar menjadi kader-kader yang memiliki komitmen terhadap ideologi, cita-cita perjuangan organisasi, dan bertanggung jawab dalam mengembangkan organisasi.
- 5) Wawasan keterpelajaran adalah wawasan yang menempatkan organisasi dari anggota pada menempatkan diri sebagai *centre of excellence* dan pemberdayaan sumber daya terdidik yang berilmu⁶⁶

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran dan pengamatan peneliti, penelitian yang membahas tentang *Persepsi Kader IPPNU IPNU Tentang Ketidakadilan Gender dalam Ruang Lingkup Organisasi Sosial Keagamaan*, belum ada, akan tetapi peneliti menemukan beberapa karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan tema tersebut.

Skripsi yang berjudul "*Pembagian Peran Gender dalam Keluarga Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Peulokan Kabupaten Aceh Selatan)*". Dalam skripsi ini membahas Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam rumah tangga yang terdapat di desa Peulokan, istri lebih banyak mengambil peranperannya baik dalam mengurus rumah maupun mengurus anak. Dalam kehidupan masyarakat desa Peulokan, peran perempuan juga masih mengalami diskriminasi. Hal ini terlihat ketika desa mengadakan rapat, maka itu hanya dihadiri oleh para laki-laki sedangkan perempuan hanya hadir untuk mendengar dan tidak diminta pendapat pada perempuan membuat hidangan bahkan mereka sangat enggan mengeluarkan pendapat. Karena laki-laki dianggap lebih tinggi kedudukannya. Kondisi ini sangat

⁶⁶ Rofik Kamilun dkk, *Buku Saku IPNU dan IPPNU*, 44

dipengaruhi oleh adat-adat dan perilaku pedesaan dan tradisi budaya yang diwariskan secara turun temurun dan tentu mempengaruhi pikiran dan perilaku warga desa Peulokan.⁶⁷ Penelitian ini berkaitan dengan penelitian saya dalam hal kebebasan dan hak perempuan dalam memberi peran di dalam sebuah kegiatan keorganisasian dan dianggap perempuan tidak memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Skripsi yang kedua berjudul “*Peran Ikatan Pelajar Nahdhatul Ulama-Ikatan Pelajar Putri Nahdhatul Ulama dalam Pemberdayaan Pemuda Melalui Pendidikan di Desa Adiwerna Tegal*”. Dalam skripsi ini membahas peran IPNU-IPPNU Adiwerna dalam pemberdayaan pemuda melalui pendidikan yaitu: memberikan pemahaman kepada anggota dan pemuda tentang pentingnya pendidikan, memberikan kesadaran yang mencakup aspek afektif dan monorik mereka dalam pengalaman berorganisasi, memperbaiki atau mengembangkan mutu karakteristik pribadi agar lebih efektif dan efisien, baik di dalam entitasnya maupun dalam lingkup global.⁶⁸ Sama-sama subyeknya dari organisasi IPNU dan IPPNU akan tetapi pembahasannya meliputi pengembangan bakat dan pemberdayaan pemuda, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang pendapat IPNU-IPPNU tentang ideologi gender.

Skripsi yang ketiga berjudul “*Analisis Gender Terhadap Ilustrasi Teks Dan Ilustrasi Gambar Dalam Buku Pelajaran Bidang Studi Akidah Akhlak Mts Kelas IX Penerbit Kementerian Agama Tahun 2016*”. Dalam skripsi ini membahas hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa; 1) gender merupakan perbedaan peran pada masing-masing jenis kelamin berdasarkan konstruksi sosial-budaya yang bersifat dinamis sehingga bukanlah suatu kodrat. Perbedaan peran gender bukanlah masalah sepanjang tidak menghasilkan ketidakadilan, namun fakta dilapangan

⁶⁷ Erniha, “PEMBAGIAN PERAN GENDER DALAM KELUARGA MASYARAKAT DESA (Studi Kasus Desa Peulokan Kabupaten Aceh Selatan)” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018)

⁶⁸ Afandi Ahmad, “Peran Ikatan Pelajar Nahdhatul Ulama-Ikatan Pelajar Putri Nahdhatul Ulama dalam Pemberdayaan Pemuda Melalui Pendidikan di Desa Adiwerna Tegal” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulla Jakarta, 2017)

seringkali menunjukkan sebaliknya. Islam sebagai sebuah sistem nilai kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah tidak menghendaki adanya perbedaan jenis kelamin yang menghasilkan ketidakadilan gender. 2) Dalam ilustrasi teks, terdapat beberapa sajian kalimat yang menunjukkan kesetaraan dimana melibatkan dua jenis kelamin sekaligus, sementara beberapa kalimat yang lain terdapat beberapa sajian kalimat yang menunjukkan netral gender dengan penggunaan kalimat yang umum dalam berdasarkan konteksnya sehingga tidak mengarah pada kesetaraan maupun bias gender. 3) Dalam ilustrasi gambar, terdapat beberapa sajian gambar yang menunjukkan kesetaraan dimana melibatkan dua jenis kelamin sekaligus dalam satu aktivitas, sementara beberapa sajian gambar yang lain menunjukkan netral gender dimana gambar disajikan sesuai pada konteksnya dalam bentuk abstrak sehingga tidak menunjukkan kesetaraan maupun bias, dari sisi bias gender terdapat beberapa sajian gambar yang berpihak kepada salah satu jenis kelamin dengan hanya memunculkan satu jenis kelamin saja berdasarkan stereotype dan subordinas.⁶⁹ Dalam kajian tersebut membahas tentang teori gender yang relevansinya tidak mencerminkan tentang teori yang ada, sedangkan penelitian saya membahas kesenjangan-kesenjangan yang terjadi dalam ideologi gender.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu tersebut, maka penelitian skripsi ini memiliki kesamaan dalam hal sama-sama membahas tentang gender dan organisasi IPNU-IPPNU, namun berbeda dalam hal permasalahan yang dikaji. Seluruh penelitian terdahulu di atas mengkaji pembagian peran gender, sementara dalam penelitian skripsi ini memfokuskan tentang ideologi gender dalam perspektif kader organisasi IPNU-IPPNU.

C. Kerangka Berpikir

Seputar Gender menjadi perhatian di era saat ini, tidak hanya oleh kalangan masyarakat, namun juga oleh kalangan

⁶⁹ Rizky Taufik Favian, "Analisis Gender Terhadap Ilustrasi Teks Dan Ilustrasi Gambar Dalam Buku Pelajaran Bidang Studi Akidah Akhlak Mts Kelas IX Penerbit Kementerian Agama Tahun 2016" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020)

organisasi salah satunya organisasi IPNU IPPNU Kabupaten Demak. Permasalahan yang dibahas pun tidaknya persoalan perempuan, namun juga bagaimana hubungannya antara laki-laki dan perempuan. Karena kala itu masih banyak kader IPPNU di kekang dan banyak aturan untuk aktif di organisasi, misalnya IPPNU tidak boleh orang tua-Nya keluar malam padahal kegiatan IPPNU sering nginap malam dan pastinya perempuan kalau masih di luar tengah malam tetangga beranggapan itu perempuan tidak baik dan di bandingkan laki-laki bebas mau bergiatan tidak ada halangan dari orang tua ataupun tetangga. Dalam kegiatan IPNU-IPPNU, laki-laki selalu mendominasi sebagai pemimpin dalam suatu kegiatan, sedangkan perempuan menepati posisi sekertaris dan lain-lain. Sehingga menjadi contoh adanya ketidakadilan gender.

Ketidakadilan gender dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk ketidakadilan. Sekarang banyak kejadian yang dapat dilihat bahwa masih banyak ketidakadilan dalam konsep ideologi gender. Setidaknya hal tersebut menjadi gambaran kepada masyarakat bahwa masih banyak orang belum bisa menjalankan yang di maksud ramah gender, bias gender dan netral gender. Sebab masih adanya pembeda antara laki-laki dan perempuan.

Metode yang digunakan adalah penelitian *field research* subyek penelitiannya kader IPNU-IPNU dengan memperoleh data memalalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Cara penyajian data malalui teknik analisis reduksi data kemudian display data dan akhirnya ditarik kesimpulan. Dan teori-teori yang digunakan meliputi teori tetntang analisis gender, kesenjangan gender dan gender dalam Islam. Penelitian ini ingin melihat ideologi gender dalam sudut pandang bias gender, ramah gender dan gender netral.

Adapun alur kerangka berpikir penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

